

Abstract

by

Raisha Hafandi,¹ Linda Yanti Sulistiawati²

Illegal fishing has become a serious issue, especially for Indonesia, known as the biggest archipelagic State. To protect its fisheries resources, Indonesia creates a mechanism to combat illegal fishing. Sinking illegal fishing vessels is believed to be an effective way to protect and maintain the sustainability of fisheries resources as it is mentioned in UNCLOS. It is often misunderstood by other States whether the sinking of illegal fishing vessels has been harmonized with UNCLOS or not. It is the purpose of this research to understand the legal basis of the action taken by the Indonesian government and also to analyse whether the sinking of illegal fishing vessels mechanism is an effective way to combat illegal fishing.

This thesis a normative-empirical research, utilizing literature research and field research to answer the legal problems. In the literature research, the writer used a literature review in collecting legal sources. In field research, the writer interviewed members of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Ministry of Foreign Affairs, and also the Centre for Defence and Maritime Studies as institutions which are related to maritime security. This research uses qualitative analysis data, resulting in descriptive and analytical information to obtain the objective of the research.

The result of this research points out that the sinking of illegal fishing vessels has already been harmonized with international instruments, especially with UNCLOS, since all of the regulations on UNCLOS have already been adopted to the Law of Fishery. From this research, the writer found that this action is an effective mechanism in combating illegal fishing in Indonesian territory.

Keyword: Illegal Fishing, Sinking Illegal Fishing Vessels, and Effectiveness

¹ Master of Legal Science Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of International Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

Intisari

oleh

Raisha Hafandi¹, Linda Yanti Sulistiawati²

Permasalahan *illegal fishing* telah menjadi masalah yang serius, terutama untuk Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar. Bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap sumberdaya ikan, Indonesia membuat suatu mekanisme untuk melawan *illegal fishing*. Penenggalaman kapal *illegal fishing* dipercaya dapat menjadi cara yang efektif untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan dari sumber daya ikan sesuai yang dituliskan pada UNCLOS. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman terkait dengan tindakan penenggalaman kapal yang melakukan *illegal fishing*, apakah telah selaras dengan UNCLOS atau belum. Hal tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memahami dasar hukum dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan juga menganalisa apakah mekanisme penenggalaman kapal merupakan cara yang efektif untuk mengatasi permasalahan terkait *illegal fishing*.

Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan untuk menjawab permasalahan hukum. Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan *interview* dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, dan Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, sebagai institusi yang terkait dengan keamanan wilayah laut. Tesis ini dianalisis secara kualitatif deskriptif, yang dilakukan dengan mengklasifikasikan, membandingkan dan menghubungkan objek penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menenggalamkan kapal *illegal fishing* sudah sesuai dan selaras dengan instrument internasional, terutama dengan UNCLOS. Dibuktikan dengan UU Perikanan telah mengadopsi semua ketentuan yang diatur di dalam UNCLOS. Selain itu, penulis menemukan bahwa tindakan penenggalaman kapal merupakan mekanisme yang efektif dalam memberantas *illegal fishing* di wilayah Indonesia.

Kata kunci: *Illegal fishing*, Penenggalaman Kapal *Illegal Fishing*, dan Efektivitas

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.